



URGENSI PENATAAN KURIKULUM DALAM PEMBENTUKAN MORAL SISWA SEKOLAH DASAR

Azhar

Abstrak

Kurikulum merupakan serangkaian pedoman pendidikan, namun belum merespon pembentukan moral dalam komponen kurikulum. Pembentukan kualitas moral manusia sebagai elemen dasar kepribadian perlu dilakukan penataan kompetensi spiritual dalam kurikulum. Jackson dan Geckeis dalam gagasannya tentang kurikulum belum memasukkan tentang pengukuran kompetensi spiritual. Fakta ini dapat ditemukan pada sekolah dasar di kota Banda Aceh. Paper ini bertujuan untuk memaparkan urgensi penataan kurikulum dalam pembentukan moral siswa sekolah dasar. Tulisan ini mengkombinasikan data kualitatif dari 6 responden guna menemukan konten penataan kurikulum pada beberapa sekolah dasar di kota Banda Aceh. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik guna mengukur kompetensi kurikulum. Berdasarkan kajian lapangan ditemukan tiga komponen utama. Pertama, urgensi penataan kurikulum, kedua, moral dalam pembahasan, ketiga, pembentukan moral siswa sekolah dasar, dan keempat, langkah strategis dan solusi terintegrasi. Kajian ini dianggap baru karena menggunakan penataan kurikulum dalam merespon moral siswa. Temuan ini dapat digunakan untuk memperkuat relevansi kurikulum dengan dekadesi moral era global. Kurikulum yang tidak tertata dengan baik akan menghasilkan lulusan dengan kemampuan afektif rendah.

Kata Kunci: *Penataan, Kurikulum, Moral, dan Siswa*

1. PENDAHULUAN

Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar di media massa terjadi pembunuhan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, narkoba, tawuran, perampokan dan lain-lain. Krisis moral ini terjadi disebabkan di antaranya oleh longgarnya pegangan agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri diantara kalangan siswa sekolah dasar di sekolah dasar, ada banyak faktor yang menyebabkan krisis moral bagi siswa sekolah dasar, di antaranya pembinaan moral yang dilakukan orang tua, sekolah dasar dan masyarakat kurang efektif; derasnya arus budaya hidup materistik dan sekuler; pengaruh arus globalisasi; dan belum sepenuhnya mengaktualisasi perilaku agama Islam dalam kehidupan. Untuk mengatasi krisis moral ini dapat dilakukan diantaranya ialah melalui aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum merupakan serangkaian pedoman pembelajaran yang digunakan di sekolah, namun belum sepenuhnya merespon pembinaan moral siswa. Pembinaan moral dapat dilakukan melalui penataan elemen kurikulum. Nana Syaudih menjelaskan penataan elemen kurikulum perlu dilakukan dalam merespon kenakalan siswa di sekolah. Hasil observasi penulis di sekolah dasar di Kota Banda Aceh menemukan bahwa kurikulum di sekolah tersebut belum sepenuhnya merespon terhadap pembinaan moral siswa. Penulis berpendapat bahwa pembinaan moral siswa dapat dilakukan melalui penataan kurikulum. [1]

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan diarahkan di samping mengembangkan intelektual dan keterampilan, juga memperbaiki akhlak/moral. Pembinaan moral lebih dititik beratkan pada pendidikan keagamaan, pendidikan keagamaan di sini berkaitan dengan usaha penanaman keimanan, ketaqwaan, akhlak dan ibadah peserta didik kepada Allah SWT. [2] Selain itu, Said Agil Husin mengatakan bahwa upaya pembinaan sikap mental sepritual yang selanjutnya dapat mendasari tingkah laku peserta didik dalam berbagai bidang kehidupan, atau dengan kata lain disebut moral. [3] Usaha mewujudkan pembudayaan moral islami pada bangsa ini, perlu dipikirkan langkah setrategis dan inovatif agar ia dapat sejalan dan menjadi bagian dalam upaya memperbaiki krisis multi-dimensional yang terjadi dan begitu memprihatinkan di negara ini. Krisis tersebut telah terjadi hampir seluruh wilayah Negara Indonesia, mulai dari level atas sampai ke level bawah. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar di media-media massa terjadi pembunuhan, KKN, narkoba, tawuran, perampokan dan lain-lain. Kejahatan tersebut terjadi di antaranya dipengaruhi oleh krisis moral, yang berakibat terjadinya dekadensi moral, mulai dari pemimpin, intelektual, para ahli, sampai rakyat biasa.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi lapangan dan *library research* (studi pustaka). Adapun penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, sedangkan teknik kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan kajian literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, [5] kemudian diambil kesimpulan dan disajikan dalam kerangka teoritis untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Penataan Kurikulum

Terdapat beberapa problem dalam penatan kurikulum untuk pembentukan moral, karena, ada anggapan bahwa salah satu sebab terjadinya krisis moral disebabkan oleh pelaksanaan sistem pendidikan yang salah, karena sistem pendidikan sekolah yang ada selama ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu *Pertama*, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang, termasuk cara berpakaian (seragam sekolah dasar), kurikulum, materi ujian, sistem evaluasi, dan sebagainya. Pendek kata, sentralisasi telah dipraktekkan dalam segala bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasional sedetail-detailnya. Pada aspek kurikulum, misalnya hampir tidak ada ruang sama sekali bagi sekolah dasar sebagai garda terdepan penyelenggaraan pendidikan untuk menambah atau menginovasi kurikulum yang diajarkan di sekolah dasarnya.[4] *Kedua*, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Lebih parah lagi, masyarakat hanya sebagai obyek pendidikan yang diperlakukan sebagi orang-orang yang tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk ikut menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Masyarakat tidak pernah diperlakukan atau diposisikan sebagai subyek dalam pendidikan. Itulah sebabnya, model pemberdayaan (*empowering*) masyarakat tidak pernah diperkenalkan. Masyarakat hanyalah obyek yang harus menerima paket dan instruksi dari penguasa. Ini sama artinya dengan perlakuan atau anggapan bahwa masyarakat adalah kumpulan orang-orang bodoh yang harus dituntun, didikte, dan selalu diperintah. Atau sebaliknya, masyarakat adalah “potensi berbahaya” yang harus selalu dikukung secara ketat tanpa ada kebebasan untuk bertindak. [5]



Ketiga, kedua sistem tersebut di atas (sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat) ditunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Birokrasi model seperti ini menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan melemahnya atau bahkan hilangnya budaya prestasi dan profesionalitas, namun atas dasar kong kalikong dengan kekuasaan, koncoisme dan suap. *Keempat*, terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagaian dari alat birokrasi. Birokrasi yang merupakan alat politik penguasa seperti uraian di atas mencengkeram kukunya kepada guru. Akibatnya, guru menjadi apatis, kreativitas dan inovasinya mati, etos kerjanya menurun, dan tanggung jawabnya sebagai guru yang bertugas mendidik dan mengajar murid juga hilang. Guru telah terampas kearifannya sebagai guru, ia dianggap hanyalah kepanjangan alat birokrasi penguasa, bukan figur yang digugu lan ditiru (dipercaya dan ditiru) oleh anak didik. Akibat lebih parah lagi, guru kehilangan orientasinya kepada murid, sebaliknya selalu berorientasi untuk laporan kepada "atasan"nya, sebab atasannya itulah yang menentukan hidup-matinya guru, bukan prestasi profesionalisme gurunya. Padahal guru yang baik adalah ketika orientasinya pada keberhasilan anak didiknya. Sudah barang tentu ia akan melakukan tugasnya dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk mendidik yang dilandasi ketulusan dan kesabaran, tanpa mengenal batas waktu, agar anak didiknya berhasil.

Kelima, pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak (kognitif), karena itu etika, budi pekerti atau akhlak peserta didik tidak pernah menjadi perhatian atau ukuran utama dalam kehidupannya, baik di dalam maupun di luar sekolah dasar. Pendidikan untuk membentuk kepribadian belum diwacanakan dan dimasukkan dalam sistem pendidikan nasional. *Keenam*, siswa sekolah dasar tidak dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan tahu (*curiosity*). Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan meneripa apa yang dipraktekkan guru. siswa sekolah dasar tidak diberi ruang untuk berpikir dan berinovasi, apalagi sampai menamukan sesuatu yang baru (*discovery*), padahal menurut teori belajar, pendidikan yang baik adalah memberikan kesempatan dan pengalaman anak pada *the enjoy of discovery*. Pengalaman ini baru dapat terlaksana jika pembelajaran yang berlangsung di kelas/sekolah dasar memberikan ruang bebas bagi setiap siswa sekolah dasar untuk menciptakan *curiosity*. Jika ciri kelima dan keenam digabungkan (yakni berorientasi pada pembentukan kepribadian serta pembiasaan *curiosity* dan *discovery*), pendidikan akan menghasilkan anak didik yang selalu berorientasi pada perilaku terpuji dan prestasi (*'amal salih*) yang sekiranya bermanfaat bagi masyarakat.[6]

Kelemahan pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas memerlukan kepada reformasi pendidikan, antara lain dengan mengubah faktor negatif menjadi faktor positif, yaitu agar sistem pendidikan: (1) tidak kaku dan tidak selalu uniformitas; (2) menghargai pluralitas potensi kedaerahan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat; (3) bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); (4) menempatkan guru sebagai pendidik, bukan alat birokrasi politik, sehingga guru harus profesional dan mempunyai rasa terpanggil untuk menjadi guru; (5) menekankan pada kepribadian keseharian anak didik untuk menjadi anak yang beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat; dan (6) menekankan pada sikap kritis, kreatif dan inovatif bagi anak didik. Untuk itu ada beberapa tawaran jalan keluar yang harus diambil untuk menghilangkan dan sekaligus memperbaiki keenam faktor di atas. Salah satu faktor yang dominan adalah terjadinya sentralisasi pendidikan pada segala bidang. Maka jalan keluar yang harus diambil dalam reformasi pendidikan adalah tekad untuk melaksanakan

desentralisasi pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana pendidikan termasuk hal-hal yang didesentralisasikan. [7]

Selanjutnya, Penataan kurikulum dalam pembelajaran merupakan suatu proses yang berkesinambungan secara sistemik, yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan control. Fungsi perencanaan harus mengacu ke masa depan, yang meliputi kegiatan menetapkan perangkat tujuan atau hasil akhir, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan akhir, menyusun program prioritas dan urutan strategi, menetapkan prosedur kerja, dan anggaran biaya. Oemar Hamalik mengatakan bahwa cakupan penataan kurikulum meliputi kegiatan membentuk tata cara pelaksanaan pembelajaran, menetapkan bentuk interaksi guru dengan siswa dan fasilitas pembelajaran, dan lain-lain. Fungsi pengarahan meliputi langkah-langkah pembelajaran yang diarahkan atau dikoodinasikan oleh guru sebagai manajer atau pengarah pembelajaran. Dan fungsi control meliputi pengadaan system pelaporan, mengukur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melakukan tindakan koreksi dan memberikan ganjaran bila diperlukan.[8] Dalam manajemen pembelajaran terdapat beberapa unsur, yaitu: tujuan yang akan dicapai, adanya proses kegiatan bersama, adanya pemanfaatan sumber daya, dan adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada. Semua unsur ini harus dikaitkan dengan komponen pembelajaran, yaitu: tujuan, materi, proses dan evaluasi. Secara singkat komponen akan dijelaskan berikut ini: Dalam setiap usaha atau pekerjaan, terutama yang melibatkan sejumlah orang, perencanaan merupakan tahap permulaan yang mutlak perlu. Banyak tujuan tidak tercapai karena tidak dibuat perencanaan yang baik. Akan tetapi perencanaan itu tidak cukup tanpa dikenjalkan sesuai dengan perencanaan. Hani Handoko mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, tetapi harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan perlu diperhatikan rencana-rencana tersebut mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Untuk itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. [9]

Menurut Ibrahim terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penataan kurikulum, yaitu: (1) perencanaan dirumuskan secara jelas dan dijabarkan secara operasional; (2) policy kebijaksanaan untuk mencapai tujuan dalam garis besarnya; (3) prosedur pembagian tugas serta hubungannya antara anggota kelompok masing-masing; (4) progress, yaitu penetapan standard kemajuan yang hendak dicapai; (5) program, yaitu langkah-langkah kegiatan untuk mencapai tujuan. Begitu juga terdapat beberapa syarat dalam membuat penataan kurikulum, yaitu: (1) tujuan harus dirumuskan secara jelas; (2) perencanaan harus sederhana dan realistis; (3) memuat analisis-analisis dan penjelasan-penjelasan terhadap usaha-usaha yang direncanakan; (4) bersifat fleksibel; (5) ada keseimbangan baik ke luar maupun ke dalam, yaitu seimbang antara bagian-bagian dalam perencanaan, sedangkan ke luar berarti seimbang antara tujuan dan fasilitas yang tersedia; (5) efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, tenaga dan sumber daya yang tersedia.[10]

Begitu juga Mulyani Sumantri menjelaskan tentang penataan kurikulum ini juga akan ditemukan beberapa fungsinya, antara lain adalah: (1) menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuan; (2) sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan rencana yang telah disusun; (3) merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program; (4) meningkat-kan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi; (5) memberikan batas wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerja sama; dan (6) menetapkan tolok ukur atau kriteria kemajuan pelaksanaan program setiap saat. Begitu juga dalam penataan kurikulum harus jelas adanya visi dan misi organisasi, bidang garapan,



tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan, kriteria keberhasilan, jadwal pelaksanaan, sumber daya yang diperlukan, anggaran serta penanggungjawab/pelaksana kegiatan. Karena dalam perencanaan juga terkandung unsur penganggaran maka dalam penyusunan anggaran harus dipertimbangkan beberapa faktor seperti: (1) prioritas kegiatan melalui pembuatan skala prioritas kegiatan; (2) bobot kegiatan dapat dilihat dari jumlah person yang terlibat, lama waktu kegiatan dan sumber daya dan dana yang diperlukan; (3) produktifitas kegiatan yang dapat dilihat dalam target kegiatan, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif; (4) efektifitas biaya yang dikeluarkan dengan manfaat kegiatan yang dilaksanakan; dan (5) efisiensi pembiayaan yang diukur dari perbandingan antara pencapaian target secara nyata dan yang seharusnya. [11]

Selanjutnya, setelah penataan kurikulum dilakukan, maka perlu ditetapkan pembagian tugas-tugas diantara orang-orang yang terlibat agar masing-masing tahu apa yang harus dikerjakan yang lazim disebut dengan pengorganisasian. Pengorganisasian di sini berarti proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu pembelajaran yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi pengorganisasian meliputi penciptaan struktur, mekanisme dan prosedur kerja, uraian kerja serta penempatan personil pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Karena organisasi merupakan alat Manajemen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, maka susunan, bentuk serta besar kecilnya pelaksana pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua asas pokok yang perlu diperhatikan dalam penataan kurikulum melalui asas koordinasi sistem pengaturan dan pemeliharaan tata hubungan agar tercipta tindakan yang sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Agar koordinasi ini dapat berjalan dengan mulus maka diperlukan tiga syarat pokok yaitu: (1) adanya wewenang tertinggi yang berfungsi sebagai pemberi arah; (2) adanya kesediaan bekerja sama antara anggota karena merasa adanya tujuan bersama yang ingin dicapai; (3) adanya pemikiran dan keyakinan yang sama yang harus dihayati oleh semua anggota.

Selanjutnya, asas hirarki yang merupakan suatu proses pewujudan koordinasi, seperti usaha yang terjadi suatu tingkatan tugas, wewenang dan tanggung-jawab. Di dalam hirarki ini diperlukan adanya kepemimpinan, pendelegasian wewenang dan pembatasan tugas; ketiga, penggerakan, yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Masalah penggerakan ini sangat erat hubungannya dengan unsur manusia, sehingga keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan guru dalam berinteraksi dan memberi motivasi kepada siswa. Dalam rangka memberi motivasi ini maka diperlukan adanya pengarahan yang jelas, berupa perintah, penugasan, petunjuk maupun pembimbingan. Supaya dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan baik, maka harus selalu ada koordinasi dari pimpinan, baik dari kepala sekolah, guru dan orang tua siswa. Untuk itu, agar seorang kepala sekolah mampu melaksanakan fungsi ini dengan baik dan mampu berkomunikasi, memiliki daya kreasi serta inisiatif yang tinggi dan mampu mendorong semangat guru dalam mengajar.

Terakhir, pengawasan dalam penataan kurikulum perlu dilakukan agar pekerjaan atau kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Terdapat tiga fungsi dalam pengawasan, yaitu: (1) mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan masing-masing unit, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan atau bahkan mencegah adanya kesalahan atau penyimpangan dari rencana yang telah disusun; (2) membandingkan dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai

dengan rencana yang telah ditetapkan; (3) mencatat semua hasil pengawasan untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan dan pelaporan.

3.2 Moral dalam Pembahasan

Sejarah telah mencatat bahwa pendidikan Islam telah menampakkan posisi dan perannya dalam pembinaan anak bangsa, dan telah menghasilkan para tokoh, intelektual, dan lain-lain yang bermoral. Akan tetapi dewasa ini pendidikan Islam kurang sanggup membentuk moral islami, sehingga hampir tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang berperan sebagai wahana pembentukan moral islami, dengan terjadinya bermacam-macam penyakit sosial sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Untuk itu perlu dipikirkan dan dirumuskan kembali tentang pelaksanaan pendidikan Islam yang dapat memperbaiki krisis moral. Pembentukan moral islami dapat dilakukan dengan merujuk pada ajaran-ajaran agama Islam sebagai contoh, bila dilakukan pengkajian secara mendalam akan nampak bahwa seluruh ajaran yang terdapat di dalamnya berujung pada pembentukan etika/akhlak, seperti mengerjakan shalat bertujuan salah satunya agar pelakunya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar (Q.S al-Ankabut: 183). Zakat dan puasa untuk menumbuhkan rasa sosial dengan membantu orang-orang yang tidak mampu. Demikian juga perintah-perintah lainnya. Pada hakikatnya krisis moral tidak boleh terjadi di Indonesia, dan yang perlu dilakukan adalah perubahan, perbaikan dan pembangunan dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk fisik maupun mental/moral melalui peningkatan sumber daya manusia. Secara umum krisis moral ini terjadi disebabkan oleh: (1) longgarnya pegangan agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (*self control*) dan lemahnya hukum sehingga terjadi pelanggaran; (2) pembinaan moral yang dilakukan orang tua, sekolah dasar dan masyarakat kurang efektif; (3) derasnya arus budaya hidup materistik dan sekuler; dan (4) belum adanya kemauan yang sungguh dari Pemerintah. Penyebab terjadinya krisis moral di atas perlu ditanggulangi dengan salah satu cara mengembangkan pendidikan yang mengarah kepada pembudayaan moral. [12]

Istilah “moral” atau “moralitas”. Moral dapat diartikan dengan “baik buruk manusia sebagai manusia”; Moralitas dapat diartikan dengan “keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap-sikap moral seseorang atau masyarakat”, Moral mengacu pada “baik-buruk” seseorang sebagai manusia, yang berarti mengacu pada perilaku, bukan pada fisik. Jadi, bukan sifat lahiriah seperti seorang yang “ganteng (bagus)” atau “cakep (cantik)”. Sangat mungkin terjadi seseorang itu cantik, tetapi moralnya buruk atau bahkan jahat. Menurut Qodri Azizy menjelaskan bahwa etika pada dasarnya identik dengan *philosophy of moral*, atau “pemikiran sistematis tentang moralitas”, di mana “yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis”. [13] Moral hampir sama dengan etika, sebab pengertian etika sebagaimana dikemukakan William K. Frankena bahwa “*philosophical thinking about morality, moral problems, and moral judgments*” (pemikiran filosofis tentang moralitas, problem-problem moral, dan putusan/pilihan moral). Dengan kata lain, kata “etika” tidak identik dengan moral atau moralitas. Namun, dalam banyak hal tidak jarang dimaksudkan sebagai hal yang identik antara etika dan moral atau moralitas; atau keduanya mempunyai sasaran, atau bahkan maksud yang sama. [14]

Gambaran moral juga dapat dilihat antara *lahiriyah* dan suara *bathiniyah* terjadi kontradiksi. Keduanya bolak balik dalam waktu yang cepat dan fluktuatif. Gambaran moral tersebut terjadi akibat komplik nilai yang terjadi antara apa yang berjalan di sekolah dasar dengan luar sekolah dasar dan antara dalam keluarga dengan dalam masyarakat; antara ucapan dengan perbuatan; antara peluang dengan larangan, dan seterusnya. [15] Untuk itu nilai-nilai moral dapat menjadikan keteraturan hubungan antara sesama manusia, dan hal itu sangat mendapatkan perhatian dalam dunia pendidikan Islam. Nilai moralitas pada



dasarnya harus tertanam pada hati nurani seseorang, yang harus diimplementasikan menjadi kebaikan atau kesalehan sosial, sebagai contoh tentang kejujuran. "Kejujuran" adalah nilai yang harus tertanam di lubuk hati perorangan, namun realisasi nilai kejujuran itu ada pada masyarakat. Nilai-nilai seperti ini kurang mendapatkan perhatian masyarakat, terutama para guru agama, mereka lebih dominan mengajarkan agama Islam lebih bersifat teori, seperti masalah ibadah dalam pengertian sempit (ibadah *mahdhah*), seperti shalat, puasa dan semacamnya. Keadaan ini perlu direformasi yang berorientasi pada pemaknaan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan yang berimplikasi pada pembudayaan moral. Dan juga harus dipikirkan bagaimana melakukan pembudayaan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk membina moral islami dapat dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah dasar), sebagaimana yang dikatakan A. Qodri Azizy yaitu: *the process of training and developing the knowledge, skills, mind, character, etc., especially by formal schooling*, dengan bekerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat. [16] Pendidikan Islam seharusnya bukan sekedar untuk menghafal beberapa dalil agama atau beberapa syarat rukun setiap ibadah, namun harus merupakan upaya, proses, usaha mendidik murid, di samping untuk memahami atau mengetahui, juga sekaligus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Ajaran Islam untuk diamalkan, bukan sekedar dihafal, meskipun ada pula aspek atau jenis yang harus dihafal. Ada tiga hal penting yang akan ditransfer melalui pendidikan, yaitu nilai (*values*), pengetahuan (*knowledge*), dan ketrampilan (*skills*). Untuk itu perlu dirumuskan tujuan pendidikan yang berorientasi pada tiga hal di atas beserta strategi pencapaiannya. Dan ketika pendidikan Islam dijalankan, maka yang menjadi sasaran utama atau penerimanya pada dasarnya adalah individual anak didik. Dari keberhasilan individual itu kemudian mengelompok sampai menjadi komunitas, dan pada akhirnya menjadi bangsa di sebuah Negara. Demikian pula ketika menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan moral itu harus tertanam pada pribadi siswa sekolah dasar. Ketika pribadi tersebut mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, ia akan berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal: (a) mendidik siswa sekolah dasar untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam; (b) mendidik siswa sekolah dasar/siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam. Di sekolah dasar yang dominan adalah yang pertama (a); sedangkan di madrasah yang dominan adalah yang kedua (b) namun keduanya, (a) dan (b), tetap harus diwujudkan, baik di sekolah dasar maupun di Madrasah.[17]

Apa yang kita saksikan selama ini, entah karena kegagalan pembentukan individu atau karena yang lain, nilai-nilai yang mempunyai implikasi sosial, hampir tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Padahal penekanan terpenting dari ajaran Islam pada dasarnya hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah bayna al-nas*) yang sarat dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan moralitas sosial itu. Sejalan dengan makna ini, arah pelajaran etika di dalam al-Qur'an dan secara tegas di dalam hadis Nabi mengenai diutusnya Nabi adalah untuk memperbaiki moralitas bangsa Arab waktu itu. Oleh karena itu, berbicara mengenai pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya, haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika/moral. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka keberhasilan hidup (*hasanah*) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (*hasanah*) di akhirat kelak. Untuk melakukan usaha penanaman nilai-nilai moral, terlebih dahulu, perlu diperhatikan fenomena pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada akhir masa orde baru, ada tanggapan umum yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia gagal. Kritik itu sebenarnya ditujukan terhadap sistem pendidikan nasional sudah mulai terdengar sebelum terjadinya krisis multidimensional. Kritik itu semakin berkembang setelah lengsernya

penguasa orde baru yang mengakibatkan krisis di segala bidang. Dari hasil kajian pelbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis etika/moral. Fenomena yang dapat disaksikan bukan saja praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di tingkat elite saja, kasus-kasus kerusakan etika/akhlak peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar, seperti tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain sudah terjadi.

3.3 Pembentukan Moral Siswa Sekolah Dasar

Proses pembentukan dapat diartikan bukan hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan dan keterampilan kepada anak didik, tetapi juga perlu menggali, mengarahkan dan membina seluruh potensi yang ada dalam diri siswa, sehingga muncul dan berkembang sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Proses pembelajaran tersebut harus berjalan dengan baik, efektif dan efisien, berupa proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan menggairahkan, tidak membosankan, serta memberikan motivasi yang baik bagi anak didik, sehingga ia memiliki ketidaktahuan, sehingga akan terus-menerus membaca, mengkaji, memikirkan, dan meneliti tentang ilmu pengetahuan yang ingin ditekuninya. Ada beberapa proses yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Ausubel dan Robinson dalam Nana Syaodih membagi proses pembelajaran kepada dua kategori, yaitu: *Reception/exposition learning-discovery learning* dan *Rote learning-meaningful learning*. *Reception/exposition* pada hakekatnya memiliki makna yang sama, hanya berbeda pada pelakuknya. *Reception learning* dilihat dari sisi anak didik, sedang *exposition learning* dilihat dari sisi pendidik (guru). Apabila mengembangkan proses pembelajaran bentuk *reception* atau *exposition learning*, maka materi pembelajaran yang diajarkan kepada anak didik dalam bentuk akhir atau jadi, baik secara lisan maupun tulisan. Siswa hanya melihat, mendengar dan menerima, tidak dituntut untuk mengolah, merenung, memikirkan, atau melakukan aktifitas lain. Sebaliknya, dalam *discovery learning*, materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk akhir atau jadi, akan tetapi anak didik dituntut untuk melakukan berbagai aktifitas atau kegiatan menghimpun berbagai informasi, mengkategorikan, membandingkan, menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikan, dan mengambil. Kegiatan proses pembelajaran ini lebih baik dilaksanakan dalam upaya mengaktifkan anak didik dalam belajar, sehingga apa yang diajarkan akan lebih mudah mereka menguasainya, mengaplikasikannya dalam kehidupan, serta menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi lingkungannya. [18]

Selanjutnya, dalam *Rote learning* materi pembelajaran yang diajarkan didik tanpa memperhatikan arti dan maknanya bagi anak didik, dan hanya menyuruh mereka menghafalnya. Sebaliknya dalam *meaningful learning*, penyampaian materi pembelajaran mengutamakan makna bagi anak didik, dan menghubungkannya dengan struktur kognitif mereka. Struktur kognitif tersebut terdiri atas fakta-fakta, data, konsep, proposisi, dalil, hukum dan teori-teori yang telah dikuasai anak didik sebelumnya. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang baik dan bermutu, maka tipe-tipe pembelajaran yang telah diuraikan di atas dikombinasikan antara satu dengan lainnya. Kombinasi tersebut antara lain adalah: (1) *meaningful-reception learning*; (2) *meaningful-discovery learning*; (3) *rote-reception learning*; dan (4) *rote-discovery learning*. [19] Dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran perlu dirumuskan metode pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan peserta didik dan materi yang akan diajarkan, baik dengan menggunakan satu, dua atau beberapa metode sekaligus. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembentukan moral siswa sekolah dasar yaitu: *Pertama*, melalui metode pembiasaan, yaitu dengan membiasakan peserta didik melakukan suatu kegiatan secara terus menerus, sehingga ia terbiasa dengan pekerjaan itu, seperti: membaca do'a sebelum belajar, berkata benar, shalat tepat waktunya, dan lain-lain; *Kedua*, metode keteladanan, yaitu metode mengajar yang berpusat pada guru dengan memberikan



contoh teladan yang baik dari setiap perbuatannya, sehingga dilihat dan dituruti oleh siswanya, seperti: disiplin, taat, kebersihan, berpakaian, dan lain-lain; dan *Ketiga*, metode *hiwar* (dialog), yaitu metode percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih tentang suatu topic bahasan yang diarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa bentuk *hiwar* yang dapat digunakan, yaitu: *hiwar khitabi* (dialog seruan Allah), *hiwar ta'abbudi* (dialog pengabdian kepada Allah), *hiwar wasfi* (dialog deskriptif), *hiwar qiyasi* (dialog naratif), *hiwar jadali* (dialog argumentatif) dan *hiwar nabawi*. [20] Selain metode pembelajaran di atas, dapat juga digunakan metode pembelajaran yang sering dikemukakan dalam buku-buku metodologi pembelajaran, seperti: metode Tanya jawab, diskusi, demonstrasi, ceramah, pemberian tugas, kerja kelompok, dan lain-lain.

3.4 Langkah Strategis dan Solusi Terintegrasi

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis moral, yaitu: (1) pendidikan akhlak/moral dapat dilakukan dengan menetapkan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan, baik di lembaga pendidikan informal, formal dan non formal; (2) mengintegrasikan antara pendidikan dan pengajaran. Hampir semua para ahli pendidikan sepakat bahwa pengajaran hanya berisikan pengalihan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang ditujukan untuk mencerdaskan akal dan memberi keterampilan. Sedangkan pendidikan ditujukan kepada upaya membentuk kepribadian, sikap dan pola hidup yang berdasarkan nilai yang luhur; (3) adanya kerjasama kelompok dan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua, sekolah dasar dan masyarakat; (4) Lembaga pendidikan formal harus berusaha menciptakan lingkungan yang bernuansa religius, seperti melaksanakan shalat berjamaah, menegakkan disiplin, memelihara kebersihan, kejujuran, tolong-menolong dan lain-lain; dan (5) Pendidikan moral harus menggunakan seluruh kesempatan dari berbagai sarana atau media, seperti kesempatan rekreasi, pameran, panorama alam, dan lain-lain harus dijadikan peluang untuk pembinaan moral.[21]

Langkah lain yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis moral, diantaranya: (1) perlunya kebijakan pemerintah tentang pengawasan yang komprehensif yang dituangkan dalam undang-undang; (2) melakukan integrasi pendidikan moral ke dalam semua disiplin ilmu dan seluruh aspek kehidupan; (3) menerapkan sanksi atau hukuman bagi orang yang kurang atau tidak bermoral yang didukung oleh undang-undang; dan (4) melakukan pembinaan moral secara kolektif melalui pendidikan, dakwah dan lain-lain. Secara umum pembinaan moral melalui aktualisasi perilaku agama dapat dilakukan melalui: *Pertama*, mengsosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan cara mengungkapkan melalui kata-kata yang dapat dipahami, memberikan penjelasan dan dialog, keteladanan dan perhatian. Komunikasi yang diberikan kepada siswa sekolah dasar melalui komunikasi yang baik, ikhlas dan cerdas, sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat akidah, pelaksanaan ibadah yang teratur, dan pembudayaan akhlak/moral dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, menciptakan hubungan antara sekolah dasar/madrasah dengan orang tua siswa sekolah dasar dan masyarakat dalam menata kegiatan yang bersifat religius dengan situasi yang kondusif, sehingga tercipta saling harga-menghargai, cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan lain-lain; *Ketiga*, memberi pengalaman dengan cara melatih dan membiasakan peserta didik berperilaku Islami, dan mampu mengeksplorasikan nilai-nilai ajaran Islam yang dari berbagai obyek kajian melalui keteladanan, pengamatan, *hiwar*, dan lain-lain; *Keempat*, mengajarkan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan kematangan, sehingga dapat dipahami, dihayati dan diamalkan materi-materi yang diajarkan, dan dapat dibudayakan dalam kehidupan; dan *Kelima*, melatih dan membiasakan siswa sekolah dasar

berpikir kritis religius dan bertindak secara religius pula, sehingga dapat menangkap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Krisis moral telah melanda bangsa Indonesia mulai dari level atas sampai ke level bawah. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar di media massa terjadi pembunuhan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), narkoba, tawuran, perampokan dan lain-lain. Krisis moral ini terjadi disebabkan di antaranya oleh longgarnya pegangan agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (*self control*) dan lemahnya hukum sehingga terjadi pelanggaran; pembinaan moral yang dilakukan orang tua, sekolah dasar dan masyarakat kurang efektif; derasnya arus budaya hidup materistik dan sekuler; pengaruh arus globalisasi; dan belum sepenuhnya mengaktualisasi perilaku agama Islam dalam kehidupan. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengatasi krisis moral, di antaranya: mengsosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan cara mengungkapkan melalui kata-kata yang dapat dipahami, memberikan penjelasan dan dialog, keteladanan dan perhatian. Menciptakan hubungan antara sekolah dasar dengan orang tua siswa sekolah dasar dan masyarakat dalam menata kegiatan yang bersifat religius dengan situasi yang kondusif, sehingga tercipta saling harga-menghargai, cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan lain-lain. Memberi pengalaman dengan cara melatih dan membiasakan peserta didik berperilaku Islami, dan mampu mengeksplorasikan nilai-nilai ajaran Islam yang dari berbagai obyek kajian, dan mengajarkan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan kematangan, sehingga dapat dipahami, dihayati dan diamalkan materi-materi yang diajarkan,serta melatih dan membiasakan siswa sekolah dasar berpikir kritis religius dan bertindak secara religius pula

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- [2] Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. & Rahmad Syah Putra, Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA Negeri 3 Meulaboh, *Jurnal Administrasi Pendidikan* 5 (3), 2017, 166-167.
- [3] Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2015.
- [4] Marian de Souza. *International Handbook Of The Religious, Moral And Spiritual Dimensions In Education*. The Netherlands: Published by Springer, P.O. Box 17, 3300 AA Dordrecht. 2006.
- [5] Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera, 2016.
- [6] Tilaar HAR, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera, 2016.
- [7] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- [8] Oemar Hamalik, *Manajemen Kurikulum*, Bandung: Bina Ilmu, 2012.
- [9] Hani Handoko, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2015
- [10] Ibrahim, *Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Rosdakarya, 2018
- [11] Mulyani Sumantri, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- [12] Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2015.



- [13] Qodri Azizy A, *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2003.
- [14] William K. Frankena, *Ethics*, Englewood Cliffs: NJ Prentice Hall, 1973.
- [15] Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. & Basyiruddin Usman M, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- [16] Qodri Azizy A, *Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2003.
- [17] Annemarie Schimme L. *Mystical Dimensions of Islam*. America: The University of North Carolina Press All rights reserved Manufactured, 1975.
- [18] Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- [19] Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- [20] Jusnimar Umar, "Aktualisasi Prilaku Keberagamaan Remaja", *Tesis*, Bandung: Pascasarjana UPI, 2006 & James Mac Lellan, *Phillosophy of Education*, Englewood Cliffs: Frenitce Hall, 1976.
- [21] Said Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: Ciputat Press, 2015.